



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
2025**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**



## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 000.7.2.1/0398/300.01 Tahun 2025 tentang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja - PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan yang bersifat teknis operasional.

Dengan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 ini, diharapkan bisa menjadi dokumen acuan perencanaan yang lebih representatif dan terukur dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah serta mendorong Sekretariat Daerah selaku koordinator pengendalian kinerja Perangkat Daerah di Kota Samarinda.



Samarinda, 19 September 2025

Sekretaris Daerah  
Kota Samarinda

**Hero Mardanus Satyawan**



---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025</b>	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.	9
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	
3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun 2025, Pergeseran Kegiatan, Penghapusan Kegiatan, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi dan Kelompok Sasaran Yang Mengalami Perubahan dan Yang Tidak Mengalami Perubahan..	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>



**DAFTAR TABEL**

1. Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 (tahun berjalan) .....	11
2. Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota 2025 ..	33
3. Tabel 3.1.1 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dilihat Dari SIPD RI Tahun 2025 .....	47



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Sekretariat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Sekretariat Daerah tahun lalu sesuai Renstra Sekretariat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang



selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, memuat Pagu Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil percepatan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sampai Triwulan II Tahun 2025.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi Pelaksanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga memberi dampak yang optimal dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah:

### **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”**

Berdasarkan visi pembangunan tersebut diatas ditetapkan misi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 5: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, Adaptif yang Berintegrasi dan Akuntabel”**

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dapat menjadi pedoman acuan kerja bagi Perubahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, berdasarkan cakupan tersebut P-RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bagian dibawah naungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung karena memuat



seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
3. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Samarinda merupakan unsur staf (pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda. Sebagai salah satu SKPD yang tak terpisahkan dari rangkaian yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Samarinda, Sekretariat Kota juga memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPS);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
22. Peraturan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
23. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



24. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 000.1-05/059/HK-KS/III/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
25. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0398/300.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025;
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Daerah Kota Samarinda untuk kurun waktu tahun 2025 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD;
- b. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolak ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan serta sub kegiatan Renja tahun berjalan dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
- b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran tahun 2025;



- c. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Menyusun dokumen perencanaan dan menentukan skala prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2025;
- e. Mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja, keterkaitan antara Perubahan Renja dan perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur



SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat maksud dan tujuan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

**BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN 2025**

**2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

Memuat kompilasi review hasil evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian triwulan II Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun-tahun sebelumnya.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

**BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang di hadapi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi renja Tahun 2025 dengan evaluasi renja triwulan II Tahun 2025, ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tetapi belum mencapai target, dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur penunjang



dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis di lingkup Sekretariat Daerah dan lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan kondisi demikian berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran yang sudah direncanakan sekaligus mempengaruhi penilaian kinerja perangkat daerah dan personil yang melaksanakan kegiatan. Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan anggaran yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah, dalam penyusunan Renja perubahan ini tidak terlepas dari evaluasi terhadap program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.765.860.833,- yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) Sub Kegiatan dengan proporsi capaian target kinerja 100%, sedangkan realiasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah, realisasi anggaran sebesar Rp 47.840.605.831,- atau sebesar 39.29%

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut :



**TABEL T-C.29**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah 2024 dan  
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025  
Kota Samarinda

Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
4 01 01	SEKRETARIAT DAERAH			88 Nilai	100%	88 Nilai	88 Nilai	100%	67,5 Nilai		63.81%
4 01 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	42.58 Indeks	-	-	-	-	-	42.58 Indeks	-	-
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73.25 Nilai	-	-	-	-	-	73.25 Nilai	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.29 Indeks	88 Nilai	100%	88 Nilai	88 Nilai	100%	88.29 Indeks	-	-
4 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah Yang Sesuai Target	80%	3 Dokumen	220%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	80%	35.71%	35.71%
4 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7 Dokumen	350%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6 Laporan	150%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8 Laporan	160%	7 Laporan	7 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	28,57%
4 01 01 2 01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	-	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
4 01 01 2 01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	-	-	-	-	-	2 Data	0 Data	0%
4 01 01 2 01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	-	-	-	-	-	2 Berita Acara	1 Berita Acara	50%
4 01 01 2 01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
<b>4 01 01 2 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>464 Laporan</b>	<b>95.7%</b>	<b>464 Laporan</b>	<b>464 Laporan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33.33%</b>	<b>33.33%</b>
4 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang / Bulan	169 Orang / Bulan	87.11%	163 Orang / Bulan	163 Orang / Bulan	100%	194 Orang / Bulan	196 Orang / Bulan	101.03%
4 01 01 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6 Laporan	100%	6 Dokumen	6 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	0%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	70 Paket	3 Paket	4.29%
4 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.000 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	12.000 Paket	803 Paket	2.68%
4 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	50 Paket	22 Paket	44%
4 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	0.00%	-	-	-	10 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3 Laporan	75%
4 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	500 Laporan	750 Laporan	150%
4 01 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	19 Laporan	89.47%	1 Laporan	1 Laporan	100%	51.5%	12%	12%
4 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	5 Unit	100%	-	-	-	24 Unit	1 Unit	4.17%
4 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	4 Unit	1 Unit	25%
4 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	12 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%	62 Unit	34 Unit	59.68%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	3 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	5 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	67.38 Indeks	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	67.38 Indeks	34.89 Indeks	34.89%
4 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	62 Laporan	30 Laporan	48.39%
4 01 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Laporan	-	-	-	-	-	65 Laporan	30 Laporan	46.15%
4 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	40 Laporan	18 Laporan	45%
4 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	5 Dokumen	93.33%	5 Dokumen	7 Laporan	100%	51.5%	36.97%	36.97%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	85 Unit	100%	95 Unit	95 Unit	100%	85 Unit	50 Unit	58.82%
4 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%	35 Unit	35 Unit	100%	16 Unit	8 Unit	50%
4 01 01 2 09 0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	5 Unit	50%
4 01 01 2 09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
4 01 01 2 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
4 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	33.33%
4 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	66.67%	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	0
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	4 Dokumen	81.22%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	70.83%	70.83%
4 01 01 2 11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	5 Paket	100%	6 Paket	2 Paket	33.33%
4 01 01 2 11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	2 Orang	50%	4 Orang	3 Orang	100%	4 Orang	2 Orang	50%
4 01 01 2 11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	262 Orang/ Bulan	74.86%	350 Orang	345 Orang/Bulan	100%	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100%
4 01 01 2 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51.5%	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	51.5%	33.33%	33.33%
4 01 01 2 12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	12 Paket	1 Paket	8.33%
4 01 01 2 12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
4 01 01 2 12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	5 Paket	41.67%
4 01 01 2 13	Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan	79.28 Nilai	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	79.28 Nilai	79.28 Nilai	100%
		Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP $\geq 70$ (BB)	97.5%						97.5%	97.5%	100%
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat $\geq 88.31$ (Sangat Baik)	87.5%						87.5%	87.5%	100%



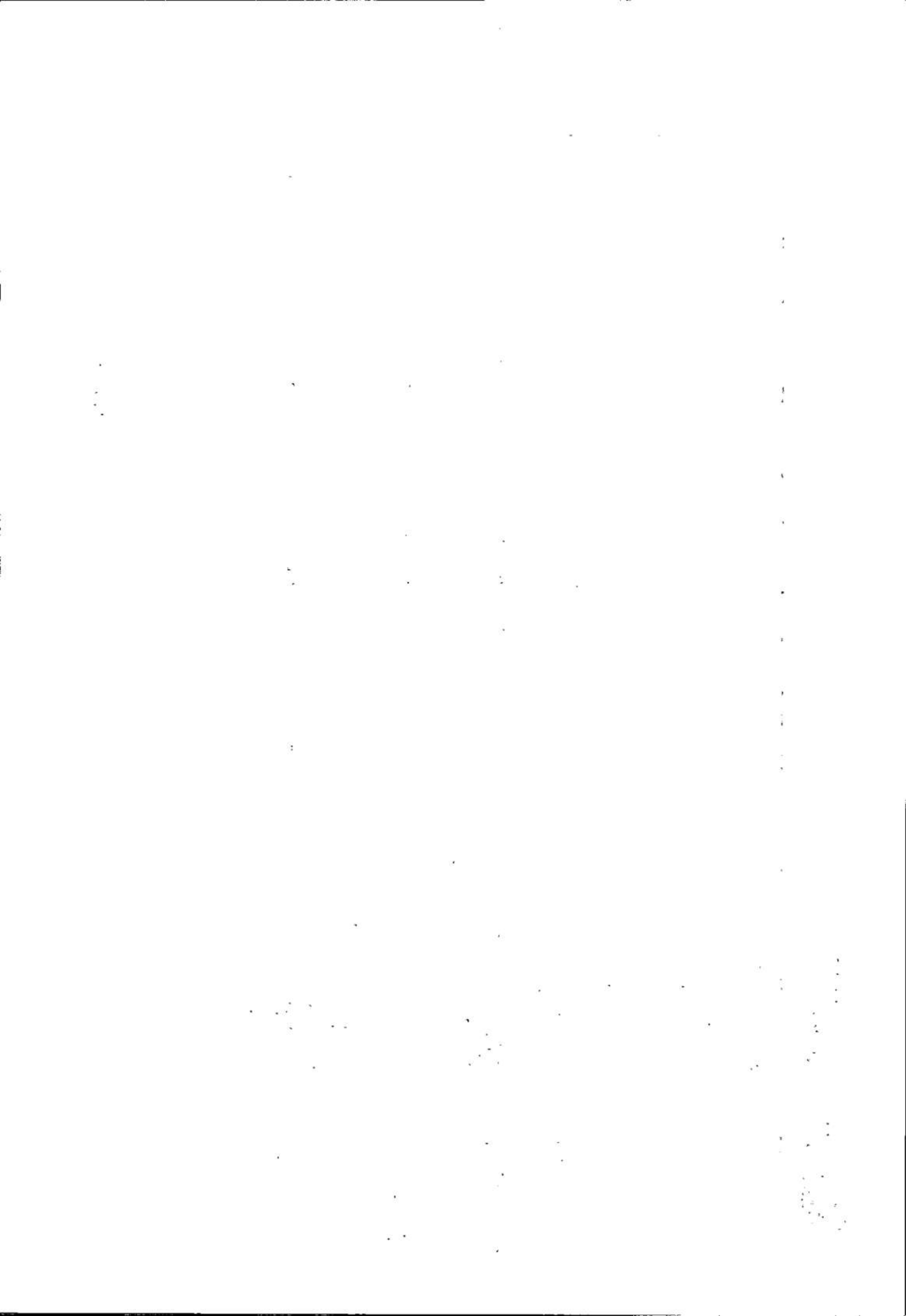
**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 01 2 13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4 01 01 2 13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 13 0004	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 01 2 14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>50.5 Indeks</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>50.5 Indeks</b>	<b>17.82%</b>	<b>17.82%</b>
4 01 01 2 14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
4 01 01 2 14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
4 01 01 2 14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0 Laporan	0%
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</b>	<b>3.5 Nilai</b>	<b>35.5 Nilai</b>	<b>100%</b>	<b>3.45 Nilai</b>	<b>3.45 Nilai</b>	<b>100%</b>	<b>3.5 Nilai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

		Persentase Tindakan lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas	80%	-	-	-	-	-	80%	-	-
		Indeks Reformasi Hukum	80.3 Indeks	-	-	-	-	-	80.3 Indeks	-	-
		Persentase Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76.92%	-	-	-	-	-	76.92%	-	-
4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.57%		233.33%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	0.57%	100%	100%
4 01 02 2 01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	4 Dokumen	400%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
4 01 02 2 01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 02 2 01 0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 02 2 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di Fasilitas	85%	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	85%	23.33%	23.33%
4 01 02 2 02 0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	8 Dokumen	0 Dokumen	0%





**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 02 2 02 0002	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 02 2 02 0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	66.67%
4 01 02 2 02 0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	0 Keluarga	0%
4 01 02 2 02 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	50 Keluarga	0 Keluarga	0%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 02 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	98%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	98%	61.71%	61.71%
4 01 01 2 03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	500 Dokumen	322 Dokumen	64.4%
4 01 01 2 03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	24 Kasus	100%	24 Kasus	19 Kasus	100%	24 Kasus	14 Kasus	58.33%
4 01 01 2 03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	500 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	500 Dokumen	312 Dokumen	62.4%
4 01 02 2 04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah	74.42%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	74.42%	13.89%	13.89%
4 01 02 2 04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	24 Dokumen	4 Dokumen	16.67%
4 01 02 2 04 0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4 01 02 2 04 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	17 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25%
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi	3%	3 Nilai	100%	3 Nilai	3 Nilai	100%	3%	-	-
		Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	95%	-	-	-	-	-	95%	-	-
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Indeks	-	-	-	-	-	70 Indeks	-	-
		Persentase Tindakanjuz Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	80%	-	-	-	-	-	80%	-	-



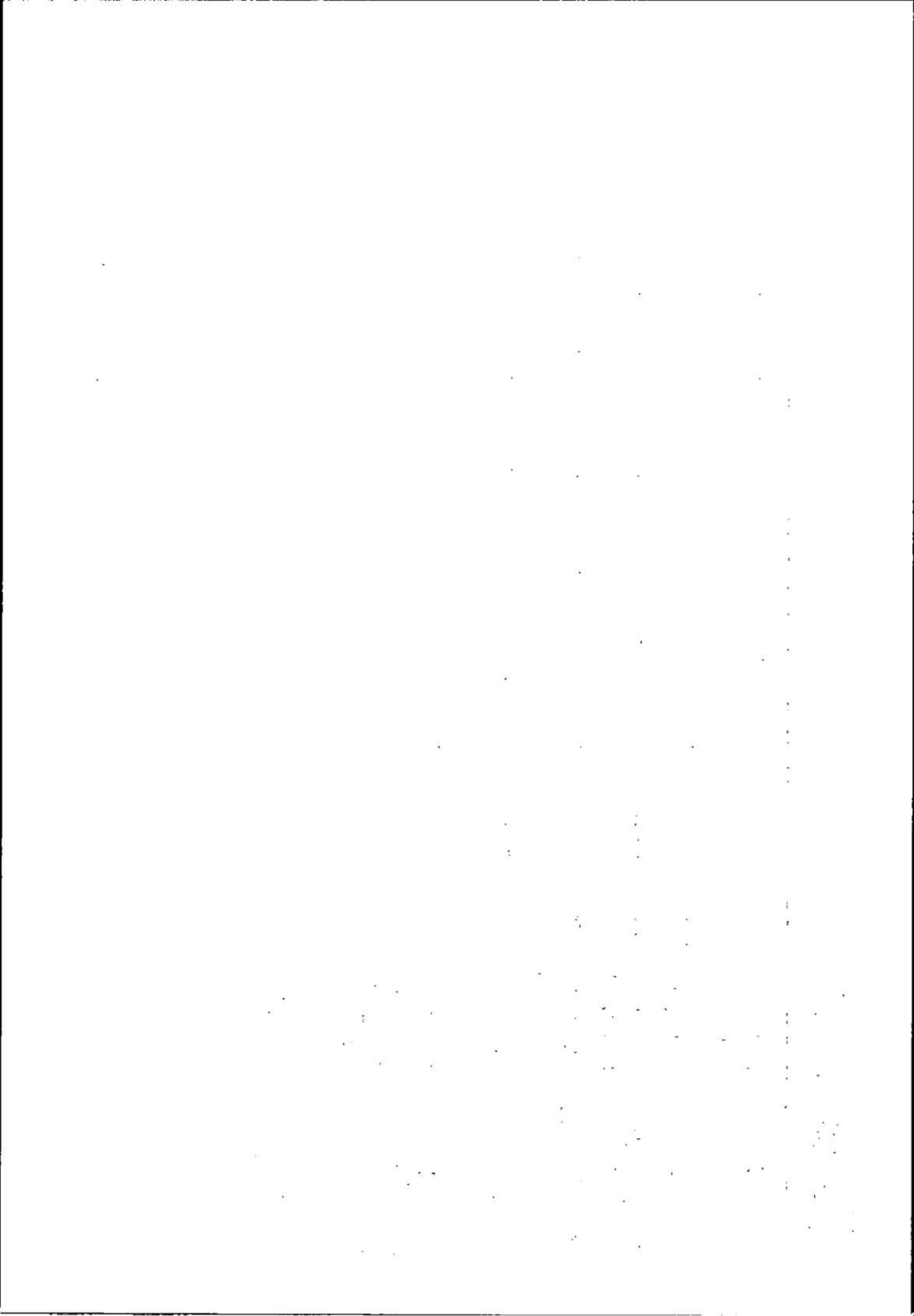
**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 03 2 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	93%	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	93%	47.50%	47.5%
4 01 03 2 01 0001	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4 01 03 2 01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	5 Laporan	1 Laporan	40%
4 01 03 2 01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4 01 03 2 01 0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4 01 03 2 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	95%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	95%	50%	50%
4 01 03 2 02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 03 2 02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
4 01 03 2 02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	10 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 03 2 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	91%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	91%	163.33%	163.33%
4 01 03 2 03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4 01 03 2 03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	2 Dokumen	4 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4 01 03 2 03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	30 Orang	100%	37 Orang	37 Orang	100%	10 Orang	39 Orang	290%
4 01 03 2 04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	80%	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	80%	50%	50%
4 01 03 2 04 0001	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4 01 03 2 04 0002	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%





**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4 01 03 2 04 0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
----------------------	---	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----

Sumber : e-dalev Setda Kota Samarinda Tahun 2024



Penjelasan tabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam tahun anggaran Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.159.723.142.711,- digunakan untuk 3 (tiga) program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.148.924.615.863,- dengan capaian target realisasi keuangan 93.24% dan capaian kinerja 100%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp.106.820.136.211,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91.87% dan untuk capaian kinerja sebesar 100%.
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp.46.260.017.400,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96.47% dan untuk capaian kinerja atau capaian fisik sebesar 100%.
4. Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp.6.642.989.100,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92.86% dan untuk capaian kinerja atau capaian fisik sebesar 100%.
5. Di Tahun Anggaran 2025 untuk Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki 3 (tiga) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.121.765.860.833,-. Realisasi Keuangan pada tahun berjalan (2025) Triwulan II (Januari – Juni) sebesar Rp.49.973.223.911,- dengan proporsi capaian target kinerja 53.81% dan capaian target realisasi keuangan 35.34%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi keuangan sebesar Rp. 37.284.762.919, capaian realisasi keuangan sebesar 33.98% dan realisasi fisik sebesar 33.98%, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat realisasi keuangan sebesar Rp.11.676.447.279,- capaian realisasi keuangan sebesar 29.68% dan realisasi fisik sebesar 49.73%, untuk Program Perekonomian dan Pembangunan dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.012.013.714,- capaian realisasi keuangan sebesar 223.13% dan realisasi kinerja 77.71%.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Renstra Sekretariat Daerah tidak terlepas dari adanya factor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya system E-Dalev dan SIPD RI dalam membantu kerja seluruh bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program/kegiatan



### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, kebutuhan dana/pagu indikatif serta perubahan atau pergeseran yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda serta pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah :

***“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”***

Berdasarkan visi pembangunan tersebut diatas ditetapkan misi pembangunan sekretariat daerah kota Samarinda yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 5 : ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”***. Program unggulan merupakan salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2025-2026 meliputi :

1. Melanjutkan dan menuntaskan **PROBEBAYA** sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT
2. Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu Bertaraf Internasional
3. Melanjutkan dan Menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial
4. Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan



5. Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta Ruang Publik Berbasis Kewilayahan
6. Melanjutkan dan Meningkatkan Program Pengendalian Banjir

### **3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.3.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistis Sektoral Daerah;
  - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
  - f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu, Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:



- a. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
    - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya;
    - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
    - d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
  - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - i. Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
    - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - e. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
    - f. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;;



- g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
  - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.9 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 1.10 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;



g. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surf menyurf
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Fungsionalisasi Kantor
- d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, anggaran
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Sub kegiatan Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya
- e. Sub kegiatan Pemeliharaan Asat Tak Berwujud
- f. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Sub kegiatan Penyediaan Paksiat Dinas dan Akibat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d. Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.10. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Sekretariat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Kelembagaan Rumah Tangga Kepala Daerah



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

**1.11 Kegiatan Penataan Organisasi.**

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

**1.12 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.**

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

**2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

**2.1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan :**

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

**2.2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat :**

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat;
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

**2.3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :**



- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum;
  - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi.
- 2.4 Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah:
- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
  - b. Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri;
  - c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan**
- 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
  - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
  - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;
- 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan :
- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan;
  - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
  - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- 3.3 Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa :
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
  - c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3.4 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.



Pada Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) Sub Kegiatan, dengan Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 121.765.860.833,- menjadi sebesar Rp 119.873.292.755,-.

Berikut adalah rincian kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Perubahan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini



**TABEL 3.1  
REKAPITULASI PERGESERAN DAN PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2025  
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		PAGU DANA			
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	RKPD 2025	APBD PERGESERAN	P-RKPD 2025 (PAGU MENJADI)	SELISIH (TAMBAH/KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>121,765,860,833</b>	<b>122,020,132,186</b>	<b>119,873,292,755</b>	<b>(2,146,839,431)</b>
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	88 Nilai	Indeks Kematangan Organisasi	42.58 Indeks	87,717,679,133	90,429,687,802	90,277,512,251	(152,175,551)
				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73.25 Nilai				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.29 Indeks				
4.01.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69 Nilai	Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	80%	446,575,000	423,689,500	388,944,500	(34,745,000)
4.01.01.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	196,575,000	189,100,000	185,100,000	(4,000,000.00)
4.01.01.2.0 1.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	75,000,000	61,589,500	55,844,500	(5,745,000.00)



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.0 1.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50,000,000	49,375,000	44,375,000	(5,000,000.00)
4.01.01.2.0 1.0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	25,000,000	24,750,000	19,750,000	(5,000,000.00)
4.01.01.2.0 1.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	25,000,000	24,750,000	19,750,000	(5,000,000.00)
4.01.01.2.0 1.0010	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50,000,000	49,375,000	44,375,000	(5,000,000.00)
4.01.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Yang Disusun	1 Dokumen	25,000,000	24,750,000	19,750,000	(5,000,000.00)
4.01.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	464 Laporan	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	38,614,501,257	38,403,819,271	38,389,043,720	(14,775,551)
4.01.01.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang / Bulan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang / Bulan	32,091,730,485	31,929,509,811	31,929,509,811	-
4.01.01.2.0 2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6,296,290,772	6,296,290,772	6,296,290,772	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.0 2.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	226,480,000	178,018,688	163,243,137	(14,775,551.00)
4.01.01.2.0 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	67,38 Indeks	145,776,000	145,338,500	145,338,500	-
4.01.01.2.0 3.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	11 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10 Laporan	145,776,000	145,338,500	145,338,500	-
4.01.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	30 Orang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	67,38 Indeks	98,900,000	98,900,000	98,900,000.00	-
4.01.01.2.0 5.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	68,900,000	68,900,000	68,900,000	-
4.01.01.2.0 5.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
4.01.01.2.0 5.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	70 Orang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
4.01.01.2.0 5.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
4.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	9 Laporan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51,5%	9,598,842,500	8,951,988,158	8,951,988,158	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.0 6.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	45 Paket	490,316,500	490,316,500	490,316,500	-
4.01.01.2.0 6.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	50 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	65 Paket	567,599,200	1,236,265,420	1,236,265,420	-
4.01.01.2.0 6.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	70 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	70 Paket	771,916,800	1,084,233,082	1,084,233,082	-
4.01.01.2.0 6.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12.000 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	30.000 Paket	2,944,380,000	2,944,380,000	2,944,380,000	-
4.01.01.2.0 6.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	50 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	50 Paket	279,260,000	208,063,156	208,063,156	-
4.01.01.2.0 6.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	10 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
4.01.01.2.0 6.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,296,290,000	1,296,290,000	1,296,290,000	-
4.01.01.2.0 6.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 000 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	3,146,060,000	1,596,940,000	1,596,940,000	-
4.01.01.2.0 6.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	100,000,000	92,500,000	92,500,000	-
4.01.01.1.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51,5%	5,264,185,000	5,861,476,111	5,861,476,111	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.1.0 7.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	24 Unit	3,255,680,000	3,255,680,000	3,255,680,000	-
4.01.01.1.0 7.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 Unit	163,300,000	163,300,000	163,300,000	-
4.01.01.1.0 7.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	40 Unit	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	62 Unit	1,504,470,000	2,101,761,111	2,101,761,111	-
4.01.01.1.0 7.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3 Unit	94,400,000	94,400,000	94,400,000	-
4.01.01.1.0 7.0007	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
4.01.01.1.0 7.0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
4.01.01.1.0 7.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	226,335,000	226,335,000	226,335,000	-
<b>4.01.01.2.0 8</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum</b>	<b>67,38 Indeks</b>	<b>13,302,007,400</b>	<b>13,302,007,400</b>	<b>13,302,007,400</b>	<b>-</b>
4.01.01.2.0 8.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-
4.01.01.2.0 8.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	60 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	62 Laporan	3,574,444,900	3,574,444,900	3,574,444,900	-
4.01.01.2.0 8.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	50 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	65 Laporan	3,107,130,000	3,107,130,000	3,107,130,000	-



No	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.0 8.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	40 Laporan	6,615,432,500	6,615,432,500	6,615,432,500	-
4.01.01.2.0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah</b>	<b>51,5%</b>	<b>6,015,298,000</b>	<b>9,437,024,386</b>	<b>9,437,024,386</b>	<b>-</b>
4.01.01.2.0 9.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85 Unit	1,187,500,000	1,187,500,000	1,187,500,000	-
4.01.01.2.0 9.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	16 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	16 Unit	896,080,000	896,080,000	896,080,000	-
4.01.01.2.0 9.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipeliharakan	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipeliharakan	10 Unit	858,100,000	858,100,000	858,100,000	-
4.01.01.2.0 9.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	51,508,000	51,508,000	51,508,000	-
4.01.01.2.0 9.0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
4.01.01.2.0 9.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	1,860,670,000	5,282,396,386	5,282,396,386	-
4.01.01.2.0 9.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	1,151,440,000	1,151,440,000	1,151,440,000	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.1 1	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	3,160,719,930	3,160,719,930	3,160,719,930	-
4.01.01.2.1 1.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	914,817,230	914,817,230	914,817,230	-
4.01.01.2.1 1.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	6 Paket	442,385,000	442,385,000	442,385,000	-
4.01.01.2.1 1.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	103,000,000	103,000,000	103,000,000	-
4.01.01.2.1 1.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350 Orang / Bulan	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	1,700,517,700	1,700,517,700	1,700,517,700	-
4.01.01.2.1 2	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan	Persentase Penuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51,5%	1,815,983,046	1,815,983,046	1,815,983,046	-
4.01.01.2.1 2.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	653,270,548	653,270,548	653,270,548	-
4.01.01.2.1 2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	12 Paket	437,672,498	437,672,498	437,672,498	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.1 2.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Paket	725,040,000	725,040,000	725,040,000	-
4.01.01.2.1 3	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	Nilai Evaluasi Kelembagaan	79.28 Nilai	1,411,330,000	985,180,500	882,525,500	(102,655,000)
				Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	97.5%				
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	87.5%				
4.01.01.2.1 3.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	540,475,000	437,354,000	402,854,000.00	(34,500,000.00)
4.01.01.2.1 3.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	196,389,000	165,789,000	150,080,000.00	(15,729,000.00)
4.01.01.2.1 3.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	227,792,000	92,691,000	66,291,000.00	(26,400,000.00)
4.01.01.2.1 3.0004	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	175,046,000	83,446,000	57,420,000.00	(26,026,000.00)
4.01.01.2.1 3.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	271,628,000	205,900,500	205,900,500	-
4.01.01.2.1 4	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	50.5 Indeks	7,843,561,000	7,843,561,000	7,843,561,000	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.01.2.1 4.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	-
4.01.01.2.1 4.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	3.200.000,000	3.200.000,000	3.200.000,000	-
4.01.01.2.1 4.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	1.643.561,000	1.643.561,000	1.643.561,000	-
<b>4.01.02</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</b>	<b>3,5 Nilai</b>	<b>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</b>	<b>3,5 Nilai</b>	<b>26.405.325,700</b>	<b>27.030.205,234</b>	<b>25.452.302,854</b>	<b>(1.577.902,380)</b>
				Persentase Tindakan lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas	80%				
				Indeks Reformasi Hukum	80.3 Indeks				
				Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76.92 %				
4.01.02.2.0 1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0.57%	2.668.106,000	2.178.668,000	1.952.066,498	(226.581,502)
4.01.02.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	430.000,000	334.084,500	317.380,275.00	(16.704,225.00)
4.01.02.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2.104.421,000	1.738.729,000	1.534.144,448.00	(204.584,552.00)
4.01.02.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	133.685,000	105.854,500	100.561,775.00	(5.292,725.00)



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.02.2.0 2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di Fasilitas	85%	9,967,109,000	10,064,100,402	9,067,671,649	(996,428,753)
4.01.02.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8,664,515,000	8,789,737,277	7,910,387,277.00	(879,350,000.00)
4.01.02.2.0 2.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	820,000,000	819,249,500	719,249,500.00	(100,000,000.00)
4.01.02.2.0 2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearifan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearifan, Trantibu m Linmas	3 Dokumen	293,393,000	290,893,000	290,893,000.00	-



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.02.2.0 2.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	94,487,000	86,191,750	77,228,000.00	(8,963,750.00)
4.01.02.2.0 2.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	94,714,000	78,028,875	69,913,872.00	(8,115,003.00)
4.01.02.2.0 3	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Jumlah Dokumen Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi</b>	<b>98 %</b>	<b>11,880,335,000</b>	<b>11,608,712,000</b>	<b>11,582,619,875</b>	<b>(24,092,125)</b>
4.01.02.2.0 3.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	500 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	500 Dokumen	337,774,000	260,622,250	241,030,125.00	(19,592,125.00)
4.01.02.2.0 3.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	11,252,087,000	11,214,600,000	11,214,600,000.00	-
4.01.02.2.0 3.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	500 Dokumen	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	500 Dokumen	290,474,000	131,489,750	126,989,750.00	(4,500,000.00)
4.01.02.2.0 4	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah</b>	<b>74.42%</b>	<b>3,889,775,700</b>	<b>3,180,724,832</b>	<b>2,849,924,832</b>	<b>(330,800,000)</b>
4.01.02.2.0 4.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24 Dokumen	2,812,595,000	2,196,220,332	1,945,420,332.00	(260,800,000.00)



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.02.2.0 4.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	803,813,900	766,338,900	704,338,900.00	(62,000,000.00)
4.01.02.2.0 4.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	273,366,800	218,165,600	200,165,600.00	(18,000,000.00)
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Angka Nilai Inflasi	3 Nilai	Tingkat Inflasi	3%	5,642,856,000	4,560,239,150	4,143,477,650	(416,781,500)
				Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	95%				
				Indeks Tata Kelola Pengadaan	70 Indeks				
				Persentase tindak lanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	80%				
4.01.03.2.0 1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	93%	1,356,812,000	1,159,328,900	1,083,338,900	(75,990,000)
4.01.03.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	238,999,000	197,913,500	157,413,500.00	(40,500,000.00)
4.01.03.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	747,770,000	634,073,000	615,833,000.00	(18,240,000.00)
4.01.03.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	240,426,000	223,862,900	206,612,900.00	(17,250,000.00)



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.03.2.0 1.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	129,617,000	103,479,500	103,479,500.00	-
4.01.03.2.0 2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	95%	1,879,409,000	1,548,896,000	1,387,392,000	(161,504,000)
4.01.03.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	364,744,000	293,331,000	262,827,000.00	(30,504,000.00)
4.01.03.2.0 2.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	651,983,000	679,823,000	608,823,000.00	(71,000,000.00)
4.01.03.2.0 2.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	662,682,000	575,742,000	515,742,000.00	(60,000,000.00)
4.01.03.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	91%	2,006,235,000	1,698,763,000	1,522,091,000	(176,672,000)
4.01.03.2.0 3.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	933,242,000	794,617,000	706,281,000.00	(88,336,000.00)
4.01.03.2.0 3.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	2 Dokumen	442,967,000	341,967,000	341,967,000.00	-
4.01.03.2.0 3.0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	37 Orang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	37 Orang	630,026,000	562,179,000	473,843,000.00	(88,336,000.00)
4.01.03.2.0 4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	60%	400,400,000	163,251,250	160,655,750	(2,595,500)



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4.01.03.2.0 4.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	132,803,000	51,586,500	50,961,500.00	(625,000.00)
4.01.03.2.0 4.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	134,915,000	49,151,375	48,600,675.00	(550,500.00)
4.01.03.2.0 4.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	4 Dokumen	132,682,000	52,513,375	51,093,375.00	(1,420,000.00)



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe 1 Akhir Periode Renstis OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Praktis an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Setelah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Sekretariat Daerah Kota Samarinda								126.476.374.612,00	121.765.860.833,00	119.873.292.755,00							155.374.274.870,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								126.476.374.612,00	121.765.860.833,00	119.873.292.755,00							155.374.274.870,00	
	4 0 1	SEKRETARIAT DAERAH								126.476.374.612,00	121.765.860.833,00	119.873.292.755,00							155.374.274.870,00	
1	4 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				65,00 70 78 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai Nilai Nilai	42,56 73,25 85,29 INDEKS NILAI INDEKS	79.952.393.036,00	87.717.676.133,00	90.278.852.249,00							108.512.170.561,00		
	4 0 1 0 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target			69 Nilai	85 %	446.000.000,00	446.575.000,00	446.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		457.601.947,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4 0 1 0 1	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	196.575.000,00	185.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		126.773.837,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4 0 1 0 1	2.01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD																



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	55.844.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		129.797,400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.01	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.375.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		72.280,700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.01	000	8	Penyelenggaraan Wadatala Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wadatala Pendukung Statistik Sektoral Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	19.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		25.750,000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.01	000	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipertahankan di Lingkungan Perangkat Daerah			2 Data	2 Data	25.000.000,00	25.000.000,00	19.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		25.750,000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.01	001	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	44.375.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		51.500,000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.01	001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lirisan Selain Rencana PO dan Renja PD														



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang dikuasai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	19.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.750,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02		Administral Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	-			464 Laporan	100 %	40.249.524,180,00	38.614.501,257,00	38.614.501,257,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		38.318,76	2.433,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02	000	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN																		
				1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				194 Orang/bulan	196 Orang/bulan	33.691.251,800,00	32.091.730,485,00	31.930.849,809,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Penghasilan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.750,29	2.567,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02	000	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
				2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	6.308.272,360,00	6.296.280,772,00	6.296.290,772,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.280,245	131,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
				5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	226.480.000,00	183.243,137,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			265.224,7	36,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03		Administral Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	-			1 Laporan	67,38 NLAJ	400.000.000,00	145.778.000,00	145.778,000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		535.754,5	00,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4	0	0	2.05	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	1	1		5		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	10 Laporan	400.000.000,00	145.776.000,00	145.335.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		535.754.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKM Pelayanan Bagian Umum				30 Orang	67,38 NILAI	600.000.000,00	98.900.000,00	98.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	902.221.187,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.05	000	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
	1	1		2		Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	5 Paket	400.000.000,00	88.900.000,00	88.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		426.842.506,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	1	1		8		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	9 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		95.461.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.05	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
	1	1		0		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	10 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		112.550.81,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
	1	1		1																		



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50 Orang	25 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		267.346,800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah			9 Jumlah Laporan	51,5 %	8.750.000,00	9.598.842,50	9.598.842,500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	20.988,417.657,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
				1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	45 Paket	500.000.000,00	490.316.500,00	490.316.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.088.495.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
				2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50 Paket	65 Paket	1.000.000.000,00	967.599.200,00	1.236.295.420,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		4.410.900.260,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
				3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			70 Paket	70 Paket	250.000.000,00	771.916.800,00	1.084.233.062,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		296.9143,15,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
				4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12000 Paket	30000 Paket	1.000.000.000,00	2.944.360,00	2.944.360,000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.750.996.430,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4	0	0	2.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
	1	1		5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	900.000.000,00	279.280.000,00	208.063.195,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.009.290.179,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.08	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	1	1		8		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.278.181,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.08	000	Fasilitas Kunjungan Tamu																	
	1	1		8		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.296.290,00	1.296.290.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.834.941.224,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.08	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	1	1		8		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	500 Laporan	3.500.000,00	3.148.060,00	1.596.940.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.347.946.296,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.06	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
	1	1		0		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	82.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			985.325,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Petunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembelian Peralatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	-		7 Laporan	81,5 %	4.729.650,00 0,00	5.264.185,00 0,00	5.264.185,00 000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		9.252.146,727,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.07	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5 Unit	24 Unit	1.000.000,00 0,00	3.255.880,00 0,00	3.255.880,00 000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugie	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.508.323,996,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.07	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
				2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 Unit	4 Unit	2.500.000,00 0,00	183.300.000,00	183.300,00 0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugie	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		4.383.746,925,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.07	000	Pengadaan Mebel																
				5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			40 Unit	62 Unit	500.000.000,00	1.504.470,00 0,00	2.101.761,111,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugie	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.453.329,664,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
				6		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	276.650.000,00	94.400.000,0 0	94.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugie	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		712.988,454,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.07	000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
				7																	



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		567.602,718,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.07	000	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud															
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		169.744,00,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.07	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	200.000.000,00	226.335.000,00	226.335.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		477.405,00,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RM Pelayan Bagian Umum	-		4 Laporan	67,36 NILAI	8.255.150,000,00	13.302.007,400,00	13.302.007,400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	14.554,948.524,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.08	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		5.304.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.08	000	2	Penyediaan Jasa Komunkal, Sumber Daya Air dan Listrik															



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 Laporan	62 Laporan	3.500.000,00	3.574.444,95	3.574.444,900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		4.231.375,037,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.00	000	3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			50 Laporan	65 Laporan	750.000,00	3.107.130,05	3.107.130,000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		3.896.766,320,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.00	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36 Laporan	40 Laporan	4.000.000,00	6.615.432,50	6.615.432,500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		6.650.396,967,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.00			Pemeliharaan Sarung Milet Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	-	7 Laporan	81,5 %	6.440.423,60	6.015.298,00	6.015.298,000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	6.829.385,267,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.00	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			85 Unit	85 Unit	1.400.000,00	1.187.900,00	1.187.900,000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.811.762,584,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.00	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

										16 Unit	16 Unit	935.879.600,00	898.080.000,00	898.080.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			993.954,95,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	1		8						10 Unit	10 Unit	1.000.500,00	858.100.000,00	858.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.336.043,254,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.09	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
	1	1		7						1 Unit	1 Unit	51.500.000,00	51.508.500,00	51.508.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045,000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.09	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
	1	1		5						1 Unit	1 Unit	53.045.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.638,300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	1		9						3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	1.860.870,00	5.282.396,396,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.461.814,282,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	1		0																			



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dinaha bilasi				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	1.101.440,00	1.101.440,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.148.320,769,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.11		Adminisras Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah				4 Laporan	100 %	2.299.702,23	3.160.719,93	3.160.719,930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	2.357.365,267,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.11	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang /Bulan	2 Orang /Bulan	764.817.230,00	914.817.230,00	914.817.230,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		787.761,747,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.11	000	Penyediaan Paket Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Paket Paket Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	442.385.000,00	442.385.000,00	442.385.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		455.696,580,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.11	000	Penaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		108.090,000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.11	000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	





**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4	0	0	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (SB) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kecukupan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	-			5 Dokumen	79,28 NLAI 87,5 % 87,5 %	1.545.000.00 0,00	1.411.330.00 0,00	1.411.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5 Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	1.620.730.964,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.13	000 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	540.475.000,00	402.854.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5 Penguatan Pelayanan yang Prima		366.905.021,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.13	000 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	196.389.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5 Penguatan Pelayanan yang Prima		240.665.043,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.13	000 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	227.792.000,00	66.261.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5 Penguatan Pelayanan yang Prima		530.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.13	000 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	175.048.000,00	57.420.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5 Penguatan Pelayanan yang Prima		143.221.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.13	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah				2	1	295.000.000,00	271.628.000,00	205.900.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			339.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.14		Peleaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3	50,5 NILAI	5.850.000.000,00	7.843.561.000,00	7.843.561.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		6.864.375.097,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.14	000	1	1	1	1	Fasilitas Keprotokolan													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				12	12	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.547.838.440,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.14	000	2	1	1	1	Fasilitas Komunikasi Pimpinan													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				12	12	2.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.434.814.938,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.14	000	3	1	1	1	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12	12	800.000.000,00	1.843.561.000,00	1.843.561.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			881.716.710,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

2	4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Indeks Reformasi Hukum			3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % INDEKS	40.416.974.570,00	28.405.025.700,00	25.452.279.856,00					41.000,00 4.085,00		
	4	0	0	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3 Dokumen	0,57 %	2.800.000,00 0,00	2.868.108,00 0,00	2.868.108.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	2.987.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 1	Penataan Administrasi Pemerintahan															
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00 0,00	430.000.000,00	317.374.500,00	Kota Samarinda, Seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		477.405,00 00,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00 0,00	2.104.421,00 0,00	1.534.129.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.750.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00 00	133.685.000,00	100.560,00 0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		159.135,00 00,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4	0	0	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urutan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi	-			5	Dokumen	--	4.250.000,00	9.967.109,00	9.967.109,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		10.258.752.775,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.02	000	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8	Dokumen	8	Dokumen	3.250.000,00	8.864.515,00	7.910.387,277,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.864.515,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02	000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pembudayaan Perungutan dan Perindugan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pembudayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4	Dokumen	4	Dokumen	500.000,00	820.000,00	719.249,50	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			788.015,30	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02	000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keasipen, Tradbun Unmas				3	Dokumen	3	Dokumen	300.000,00	293.393,00	290.893,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			544.241,276,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

4	0	0	2.02	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										4				
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			100	50	100.000.000,00	94.487.000,00	77.228.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		132.776,940,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.02	000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										5				
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			150	50	100.000.000,00	94.714.000,00	68.913.872,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		130.264,257,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi		3	96 %	29.227.204,878,00	11.880.335,00,00	11.880.335,000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seuruh Masyarakat Kota Samarinda	19.384,521.323,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03	000	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										1				
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			500	500	350.000.000,00	337.774.000,00	241.030,125,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		377.775,861,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03	000	Facilitasi Bantuan Hukum										2				
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			24	24	28.727.204,878,00	11.252.087,00,00	11.214.600,200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		18.788,104.561,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03	000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum										3				





**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

3	4	0	0			PROGRAM PEREKONOMI ANDAN PEMBANGUNAN	Tingkat Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase Indikator Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah			3 Nilai	3% 70 80 85 % INDEKS %	6.107.007,00 0,00	5.642.806,00 0,00	4.142.160 850,00					7.800.770 224,00		
	4	0	0	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Personel	Persentase Kegiatan Fasilitas Kebijakan Urusan Personel yang ditindaklanjuti			5 Dokumen	88 %	1.460.007,00 0,00	1.356.812,00 0,00	1.356.812 000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	1.864.666 833,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			3 Dokumen	2 Dokumen	260.007.000, 00	238.969.000, 00	157.413,50 0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		267.921,4 90,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 2	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan															
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan			5 Laporan	5 Laporan	800.000.000, 00	747.770.000, 00	815.830,00 0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.060.900 000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000, 00	240.426.000, 00	206.812,50 0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		288.152,5 53,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	0	0	2.01	000 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemberian BLUD															





**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			3 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	933.242.000,00	706.281.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.972.285.241,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03	000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			3 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	442.967.000,00	341.967.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		714.253.047,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.03	000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			37 Orang	10 Orang	697.000.000,00	630.026.000,00	472.529.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.094.581.483,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.04		Penertauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)		3 Dokumen	80 %	450.000.000,00	400.400.000,00	400.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sekolah Masyarakat Kota Samarinda	747.934.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.04	000	Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	132.803.000,00	50.961.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		249.311.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	0	0	2.04	000	Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Sudek, Persandian			4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	134.915.000,00	48.500.875,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			248.311,500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
4	0	0	2.04	000	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	122.882.000,00	51.093.375,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			248.311,500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
<b>J U M L A H</b>											<b>126.476.374,812,00</b>	<b>121.786.960,833,00</b>	<b>119.873.292.755,00</b>								<b>188.374,274.870,00</b>	



#### BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun 2025 di lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyusaian tersebut sebagai Panduan Sekretariat Daerah dalam menyusun perubahan prioritas dan plafon Anggaran Sementara sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 19 September 2025



Sekretaris Daerah  
Kota Samarinda

Hero Mardanus Satyawan



# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Balaikota, Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kode Pos 75242  
Kalimantan Timur

Yth

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
4. Camat Se-Kota Samarinda

**SURAT EDARAN**

Nomor: 000.7.2.4/0398/300.01

**Tentang**

**Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda  
Tahun 2025**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2025, menyesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dukungan prioritas Provinsi dan Nasional;
2. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kota Samarinda;
3. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025;
4. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai dengan sistematika penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (Lampiran 2)
5. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Lampiran 3.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
SEKRETARIS DAERAH,

**HERO MARDANUS SATYAWAN**

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1368F-2025-16-60-010



Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Lampiran 1

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/0398/300.01

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
9. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
13. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
14. Dinas Perikanan Kota Samarinda
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
16. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
20. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
21. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
22. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
26. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
29. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
30. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
31. Kecamatan Palaran
32. Kecamatan Samarinda Ilir
33. Kecamatan Samarinda Seberang
34. Kecamatan Samarinda Utara
35. Kecamatan Samarinda Ulu
36. Kecamatan Sungai Kunjang
37. Kecamatan Sambutan
38. Kecamatan Sungai Pinang
39. Kecamatan Samarinda Kota
40. Kecamatan Loa Janan Ilir



Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## **Lampiran 2**

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda  
Nomor : 000.7.2.4/0398/300.01

### **Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

- BAB I      Pendahuluan**  
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah
- BAB II     Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan**  
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025
- BAB III    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
- BAB IV     Penutup**  
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

### **Lampiran 3**

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda  
Nomor : 000.7.2.4/0398/300.01

#### **Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kota Samarinda Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
1	16 April 2025	Surat Edaran Wali Kota Tentang Penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2025
2	Minggu ke 3 April 2025	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025
3	23 April 2025	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
4	Minggu ke-4 April 2025	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 diverifikasi oleh BAPPERIDA
5	Minggu ke-5 April 2025	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD PD Tahun 2025
6	Minggu ke-2 Mei 2025	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
7	Minggu ke-4 Mei 2024	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025 diverifikasi oleh BAPPERIDA
8	Minggu ke-3 Juni 2025	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
9	Minggu ke-4 Juni 2025	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2025



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA)**

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

**Pasal 3**

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

**Pasal 4**

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
  - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
  - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
  - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
  - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
  - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
  - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
  - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
  - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
  - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;

- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
  - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
  - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
  - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
  - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
  - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
  - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
  - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
  - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
  - ab. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
  - ac. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
  - ad. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
  - ae. Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - af. Kecamatan Samarinda Seberang;
  - ag. Kecamatan Palaran;
  - ah. Kecamatan Sungai Kunjang;
  - ai. Kecamatan Samarinda Kota;
  - aj. Kecamatan Samarinda Ulu;
  - ak. Kecamatan Samarinda Ilir;
  - al. Kecamatan Samarinda Utara;
  - am. Kecamatan Sambutan; dan
  - an. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,  
  
ANDI HARUN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455  
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 000.1-05/059/HK-KS/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 000.9-05/036HK-KS/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas , Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 000.9-05/036/HK-KS/I/2024 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut :

Pengarah : 1. Wali Kota Samarinda  
 2. Wakil Wali Kota Samarinda

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Wakil

Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
3. Asisten Administrasi Umum

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Setda Kota Samarinda

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Samarinda  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Samarinda  
3. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Samarinda  
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda  
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda  
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Samarinda  
7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Samarinda  
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Samarinda  
9. Kepala Bagian Umum Setda Kota Samarinda  
10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda  
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Samarinda  
12. Hj. Wahyuni, SE, MM (Staf Perencanaan Program)  
13. Ary Kurniawan (Staf Perencanaan Program)  
14. Iwan Arianto (Staf Perencanaan Program)  
15. Dewi Sri Minarni, A.Md (Staf Perencanaan Program)  
16. Eka Supratiana, SE (Staf Perencanaan Program)

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

Tembusan :

1. Inspektur Kota Samarinda
2. Kepala BPKAD Kota Samarinda
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

misj/24/06/sekda/bag.tu.rencana.kerja.setda